



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DIREKTUR UTAMA
PERUM DAMRI**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2023-2024 |
| Masa Persidangan | : V |
| Rapat Ke- | : 14 (Empat belas) |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, Tanggal | : Selasa, 11 Juni 2024 |
| Waktu | : Pukul 14.45 s.d. 16.40 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 |
| Ketua Rapat | : M. Sarmuji, S.E., M.Si. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PG) |
| Acara | : 1. Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023; 2. Lain-lain |
| Sekretaris Rapat | : Dewi Resmini, S.E., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI) |
| Hadir | : A. ANGGOTA DPR RI: 26 dari 55 orang Anggota dengan rincian: |

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDIP)**

8 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulisto
3. Rieke Diah Pitaloka
4. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
5. Sonny T. Danaparamita
6. Ir. Deddy Yevry Hanteru Sitorus, M.A.
7. Sondang Tiar Debora Tampubolon
8. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

5 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Ir. H. Mohamad Idris Laena
4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.

5. Drs. H. Dadang S. Muchtar

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)

5 dari 8 orang Anggota

1. H.M. Husni , S.E., M.M.
2. Khilmi
3. Ir. H. La Tinro La Tunrung
4. M. Husein Fadlulloh, B. Bus., M.M., M.B.A.
5. Mulan Jameela

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

2 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Subardi, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

0 dari 6 orang Anggota

-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

0 dari 5 orang Anggota

-

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

3 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina
3. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota.

1. Dr. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A
2. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
3. Hj. Intan Fauzi, S.H., LLM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

-

B. UNDANGAN:

Direktur Utama Perum DAMRI (Dr. Ir. Setia N. Milatia Moemin, M.B.A.) beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Harris, bisa kita mulai Pak Harris?

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang terhormat Saudari Setia N. Milatia Moemin, Direktur Utama Perum DAMRI, beserta seluruh jajaran,**

Puji dan syukur marilah kita *haturkan* ke Hadirat Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya pada hari ini kita bisa mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum DAMRI beserta seluruh jajaran dalam keadaan sehat *walafiat*.

Menurut laporan dari Sekretariat, yang tanda tangan hari ini 21 orang, mulai pagi tadi kita rapat, anggota izin 15, jumlah fraksi 6, dengan demikian berdasarkan tata tertib kita bisa membuka rapat dengar pendapat hari ini dan saya nyatakan rapat terbuka untuk umum.

Setuju ya?

**(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.45 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Kami ingin mendapatkan persetujuan dari peserta rapat, kita rapat sampai jam berapa Pak Harris? Empat, bisa ya? Jam empat ya.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-bapak/Ibu-ibu yang saya hormati,

Sekitar setahun yang lalu atau tepatnya tanggal 6 Juni 2003, 2023, pemerintah atas inisiatif Kementerian BUMN telah resmi menggabungkan Perum DAMRI dengan Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta atau PPPD.

Dengan adanya merger tersebut maka Perum DAMRI menjadi satu-satunya badan usaha milik negara yang bergerak di bidang transportasi berbasis jalan. Kebijakan merger tersebut dimaksudkan agar tidak ada lagi



tumpang tindih kebijak, tumpang tindih antar BUMN, dalam layanan yang sama. Di samping itu melalui merger ini, diharapkan akan menjadikan Perum DAMRI memiliki aset yang lebih besar, serta jangkauan layanan yang lebih luas pada masyarakat, sehingga dapat menjadi perusahaan yang lebih kompetitif.

Sehubungan hal tersebut, dalam kesempatan RDP kita kali ini, Komisi VI DPR ingin mendengarkan secara langsung perkembangan kinerja korporasi Perum DAMRI, terutama setelah merger dengan Perum PPD, tantangan apa yang dihadapi Perum DAMRI, serta bagaimana strategi dalam menghadapi tantangan tersebut.

Saya pikir itu saja *concern* kita pada hari ini, dan untuk mempersingkat waktu, supaya kalau ada yang mau nonton bola enggak ketinggalan nanti jalan ke GBK, saya persilakan Bu Dirut untuk memaparkan sesuai dengan agenda yang dimaksud, kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Terima kasih, Bapak Ketua Sidang.

Pak Ketua Komisi VI dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat,

Alhamdulillah, kami gembira sekali hari ini bisa berjumpa, bisa diundang oleh Bapak-bapak dalam rapat ini untuk menjelaskan mengenai proses penggabungan dan setelah penggabungan. Hari ini kebetulan kami datang seluruh tim, lengkap, Pak. Jadi ada Direktur Keuangan, Pak Joni. Ada Direktur Teknik, Pak Arifin. Ada Ketua SPI kami, Pak Ombes Edy Kaolana. Ada Bu Ade, oh enggak kelihatan, maaf, dari Direktur SDM, jadi kami, dan seluruh kadiv-kadiv kami yang ada di, duduk di belakang kami. Boleh di halaman 1, *next*, kenapa? Ada, Bu Ade.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, iya.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Sebelah kanan, Pak, dari Direktur SDM.

Jadi, kami akan membagi presentasi kami dalam dua bagian, yang pertama adalah kondisi sebelum penggabungan dan kondisi perusahaan setelah penggabungan. Kami berharap dari rapat ini, dengan kerendahan hati, mungkin kami bisa mendapatkan banyak masukan dan saran-saran, Pak, dan arahan dari Komisi VI untuk bagaimana bisa mengatasi tantangan-tantangan dan mencapai apa yang kami cita-citakan di buku putih.



Next, jadi kita mulai dari kondisi perusahaan sebelum penugasan, yang pertama adalah *milestone* dari, dari penggabungan Perum DAMRI, Perum PPD ke dalam Perum DAMRI. Di awal 24 Desember 2021 itu mulai dibentuk oleh Kementerian BUMN Tim PMO Merger dengan terbitnya SK BUMN mengenai Tim Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Badan Usaha Milik Negara.

Lalu kemudian, pada tanggal 22 Desember, terbit Izin Prinsip Menteri BUMN atas Rancangan Penggabungan Transportasi Jalan yang ditujukan kepada Perum DAMRI dan Perum PPD melalui surat nomor berikut.

Lalu kemudian, pada tanggal 18 Januari 2023, eh mohon maaf saya enggak bawa ..., terbitnya PP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perum DAMRI. Karena pada tahun 2014, Perum PPD itu mendapatkan bantuan bus dari PMN, dari Kementerian Perhubungan sebanyak 600 bus, di mana sampai dengan saat hampir penggabungan, itu belum di PMN-kan, sehingga kami harus mem-PMN-kannya supaya selesai, dan bisa dilakukan merger karena itu salah satu prasyarat dari merger Perum.

Lalu kemudian tanggal 6 Juni 2023, seperti kita tahu, dengan terbitnya PP Nomor 30 Tahun 2023, kita semua bergabung, artinya 1 tahun lebih 6 hari, eh 5 hari, hari ini, lalu kemudian pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 468, ditetapkan nilai kekayaan tentang Penetapan Nilai Kekayaan Perusahaan Perum PPD yang digabungkan ke dalam Perum DAMRI. Lalu kami melakukan beberapa, beberapa pekerjaan di dalam melakukan penggabungan tersebut, termasuk pembentukan pokja-pokja berdasarkan fungsinya.

Pada, singkatnya pada, jadi *gini*, itu tadi tahun 2022, lalu penggabungan bulan Juni tahun 2023, jadi ada *full year* 20, 2022 dan satu semester di 2023, *gitu ya*.

Makanya untuk yang Perum DAMRI nanti kita menggunakan buku keuangan yang sudah diaudit oleh KAP, yaitu pendapatan 931,1 miliar, lalu kemudian untuk semester satunya, kami mendapatkan 544,7 miliar. Lalu untuk beban adalah 922,2, lalu kemudian pada semester 1, 534, sehingga pada akhir tahun ini kita laba 8,9 dan semester 1, 10,6 miliar.

Pada 2022 ini, pada batas-batas tertentu kami masih memang terimbas oleh Covid karena pada 2020-2021 itu total, adanya pembatasan perjalanan, kami hampir tidak bisa berjalan dan berarti tidak ada penghasilan. Lalu kemudian saldo kas setara awal tahun pada 2022 adalah 53,6 miliar, jadi 2022 kami mulai menanjak, tetapi kami mendapatkan penugasan untuk merger dengan PPD. Jadi PPD masuk ke DAMRI, PPD-nya hilang, jadi tidak ada lagi legalitas perusahaan PPD. Lalu saldo kas setara akhir periode 118, lalu ketahanan kasnya, pada waktu 2022 sebelum penggabungan, ketahanan kasnya cukup bagus, 48 dan pada semester 1, 20 hari.



Demikian juga dengan Perum PPD, pendapatannya adalah pada akhir *audited* 443,5, semester 1, 203. Lalu beban 436,1, dan pada semester 1, 224. Berarti laba di-*audited* 2022 labanya 7,4, tetapi ini dengan catatan, nanti kami akan menjelaskan di belakang, lalu kemudian semester 1 (-) 21,5 miliar. untuk EBITDA. Lalu kemudian saldo setara kas di awal tahun pada 2022 4,6 miliar, semester 1, 8,1. Lalu saldo kas akhir 8,1 27,7, ketahanan kas hanya 6 hari pada tahun 2022 dan semester 1, 16 hari.

Lalu kinerja keuangan perusahaan sebelum penggabungan, jadi bisa kita lihat, ini masih terpisah karena sebelum penggabungan, Pak. Jadi, aset lancar pada DAMRI itu 145,2 di tahun 2022, Perum PPD 102,6. Lalu di semester 1, 157,9, lalu di sini di PPD 105,7. Aset tidak lancar 783,3 atau *fixed asset*, lalu 743,7. Aset tidak lancar pada PPD adalah 315 pada 2022 dan semester 1, 304,8. Jadi total aset DAMRI adalah 928,4, semester 1, 901,6. Total aset PPD adalah 417,8 dan pada semester 1, 410. Liabilitas jangka pendek untuk DAMRI 151,7, pada semester 1, 107,2. Liabilitas jangka pendek PPD 185,7 dan pada semester 1, 202,8. Liabilitas jangka panjang untuk DAMRI 367,1, 353,5. PPD 103,7, 123,6 sehingga total liabilitas 518,9, 460,8.

Mayoritas liabilitas pada DAMRI adalah liabilitas pada pihak ketiga seperti perbankan. Sedangkan pada DAMRI, *eh* pada PPD, liabilitas pada saat penggabungan ini masih banyak terdapat utang-utang macet. Lalu kemudian ekuitas itu pada DAMRI 409,6, pada semester 1, 440. Jadi kalau kita melihat dari rasio likuiditasnya, DAMRI mencapai 96% lalu semester 1, 147%. Sementara PPD 55% dan semester 1 52%. Rasio solvabilitasnya adalah 179% dan semester 1 196%. Untuk PPD 144 dan 126. Untuk *Debt Equity Ratio* itu 1,3 untuk DAMRI dan 1,1 pada semester 1. *Debt Equity Ratio* 2,3 dan 3,9, jadi *debt*-nya cukup berat yaitu 3,9. Lalu kemudian *Debt Asset Ratio* atau DAR itu adalah 1,8 untuk DAMRI, semester 1, menjadi 2. Lalu kemudian DAR untuk PPD, 1,4 dan 1,3. Untuk *Debt Service Coverage Ratio* atau DSCR itu buat DAMRI 1,8 dan 1,18, DSCR untuk PPD 1,5 dan 0,63.

Lalu pada saat sebelum penggabungan, ada beberapa kewajiban akibat Covid yang selama 2 tahun lebih, hampir 2 tahun setengah, itu di mana kita tidak bisa *full* untuk beroperasi, yaitu untuk DAMRI, utang gaji 42,43 miliar, untuk semester 1 di tahun 2023 sudah turun menjadi 32,74 yang terus menurun, karena kami terus mencicil utang-utang gaji ini. Lalu kemudian untuk gaji Perum PPD 5,12 dan 8,03. Untuk pesangon, yaitu ada 34,78.

Di sini untuk DAMRI, kita sebetulnya tidak mengenal kata pesangon, karena kami memakai DPLK mandiri. Jadi dikelola oleh Bank Mandiri. Sementara untuk PPD memang menggunakan pesangon, dikelola sendiri yaitu 3,43 dan 5,97. Untuk BPJS kesehatan itu tidak ada tunggakan yaitu 000, semuanya. Lalu BPJS-TK atau ketenagakerjaan, utang Perum DAMRI 27,29 dan pada semester 1 turun menjadi 22,2, BPJS-TK 13,63 lalu turun menjadi 11,61. Untuk kompensasi, di DAMRI tidak mengenal kompensasi, tetapi di PPD mengenal kompensasi untuk PKWT, yaitu 11,13 dan 10,80. Jadi total Perum DAMRI 104,50 dan 75,31, sedangkan Perum PPD 33,32 dan 36,41.



Yang jadi masalah adalah *average ratio* dari PPD itu hanya 0,63 karena piutang sebesar 37 miliar sudah dibukukan pada tahun 2019, sementara pemberi pekerjaan tidak mengakui adanya piutang tersebut, nanti kami akan jelaskan lebih lanjut untuk mengenai hal ini, sehingga PPD tidak dapat, hal itu tidak diakui oleh pemberi tugas karena PPD tidak bisa membuktikan dengan dokumen-dokumen bahwa terjadinya piutang tersebut kepada PPD.

Lalu utang PPD kepada pihak lain sebelum penggabungan, ini yang cukup menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar adalah pinjaman jangka pendek sebesar 6,58 miliar, utang usaha 31,5 miliar, utang pajak 44 koma miliar, 44,5 miliar, pendapatan diterima di muka 0, beban akrual 24,06, utang bank jangka pendek 3,01, yang nanti kami jelaskan bahwa ini akhirnya dilunasi, karena di sini ada pinjaman jangka pendek kepada pihak-pihak ketiga yang nonperbankan, yang diakibatkan karena PPD tidak *bankable*, lalu utang lain-lainnya adalah 39,91. Jadi total liabilitas jangka pendeknya PPD adalah 149,55 miliar.

Lalu liabilitas untuk jangka panjangnya, yaitu liabilitas kontrak kepada ADCP yaitu 30 miliar, utang bank jangka panjang, utang rekening dana investasi 24,15 miliar, *liabilities* imbalan pasca kerja sebesar 8,25 miliar, kewajiban pajak tanggungan sebesar 30 koma, tanggungan, mohon maaf, 30,53, utang lain-lain jangka panjang sebesar 11,99, sehingga liabilitas jangka panjang sebesar 104, dan total liabilitas ini adalah sebesar 254,47 miliar, yang macet semuanya. Jadi ini adalah PR tersendiri. Sementara pada DAMRI, pada pihak ketiga itu, utang-utangnya lancar, baik kepada perbankan, maupun kepada vendor. Yang kita cicil itu adalah kepada SDM.

Lalu kemudian *critical issue* di perusahaan sebelum penggabungan. Untuk aspek bisnis, yaitu memang DAMRI punya tantangan yang terus-menerus adalah, oh ya mohon maaf, jadi, oh belum, nanti. Alat produksi itu perlu dilakukan peremajaan, lalu kemudian kami juga mengalami masalah komponen biaya operasi kendaraan untuk angkutan perintis, itu belum bisa mengakomodir standar biaya dan *overhead*, karena untuk perintis ini kami belum mendapat penugasan, tetapi kami harus melalui tender, walaupun itu ada di P3T atau Terluar, Terjauh, dan Perbatasan.

Kemudian angkutan perintis ini kita harus menggunakan skema lelang setiap tahunnya, walaupun setiap tahun memang tidak ada peserta lain kecuali kami, pada daerah-daerah Indonesia timur dan daerah terpencil. Tapi kalau daerah masih di Jawa *kayaknya* perintis hampir tidak ada ya, Pak, ya, jadi, ada kecil-kecil kayak misalnya di Banten, lalu kemudian ada lagi di Jawa, Cilacap ya, jadi ada tapi sedikit.

Lalu kemudian, aspek SDM adalah utang dari DPLK DAMRI atau dana pensiun DAMRI, utang BPJS DAMRI, BPJS ini adalah BPJS tenaga kerja, utang gaji karyawan, lalu penyesuaian UMK DAMRI, karyawan PKWT DAMRI yang melebihi usia kontrak 3 tahun.



Untuk Perum PPD sendiri, *critical issue* sebelum penggabungan adalah cakupan wilayah bisnisnya hanya di Jabodetabek dan lebih dari 90%, tepatnya 95% pendapatan PPD hanya berasal dari layanan Transjakarta. Dan pada saat penggabungan, itu 102 kontrak, eh 347 kontrak itu habis pada saat penggabungan dan 102-nya habis pada bulan Agustus setelah penggabungan. Jadi, setelah itu yang tersisa hanya 5% dari pendapatan lain-lainnya, dari angkutan lainnya 95%-nya itu selesai.

Lalu kemudian, jadi terlihat di sini, tidak diperpanjangnya 102 unit bus pada April 2022 dan berakhirnya kontrak 348 unit bus di Transjakarta pada bulan Agustus 2023.

Lalu kemudian ada isu pengalihan perjanjian sebelumnya PPD menjadi DAMRI dengan PT Transjakarta dan PT Mobilindo Angka, Armada Cemerlang, jadi ada KSO yang dilakukan oleh PPD.

Untuk aspek legal, proses penerbitan PPNBMN dari Perum PPD akhirnya selesai, sehingga akhirnya pada tanggal 6 Juni kita bisa digabung, dilakukan penggabungan dengan *surviving company*-nya adalah DAMRI. Status aset APPD yang tidak *clean* dan *clear*, artinya tidak, persuratannya belum jelas, itu adalah 11 dari 14 lokasi dan sebagian tidak dalam penguasaan. Tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Perum DAMRI namun belum bersertifikat atas nama Perum DAMRI sebanyak 8 lokasi, termasuk di antaranya diduduki warga, EPPD, diduduki warga yaitu yang di Ciracas. Lalu kemudian tanah yang setelah habis masa berlakunya atau HGB sebanyak 3 lokasi. Perpanjangan dan permohonan perubahan kartu pengawasan. Lalu kemudian utang-piutang dari konsorsium, yang dulu rupanya waktu baru masuk ke Transjakarta, PPD itu memiliki konsorsium di Transjakarta, itu menjadi, menjadi semacam pihak ketiganya Transjakarta, membentuk konsorsium dengan Mayasari Bakti dan operator-operator lainnya, ada GMT, ada, macam-macam *deh* namanya, dan ini kelihatannya bukunya belum ditutup, sehingga masih ada utang-utang yang ditagihkan.

Lalu kemudian dari, dari aspek keuangan, utang pajak PPD beserta potensi sanksi atas keterlambatannya terhadap PPN, jadi ada PPN yang, yang kami tahu 5 tahun terakhir dari kami periksa, itu memang beberapa belum dibayar, PPh 21, PPh 22, PPh 23, 25, PPN, antara tahun 2017 sampai 2021. Lalu kemudian yang kedua, ada pinjaman PPD kepada BTN dan PPA *Finance* yang tidak lancar atau macet, yang pembayarannya kita sudah mulai lakukan di bulan Juli dengan dibantu oleh DAMRI.

Lalu kemudian utang biaya akrual PPD kepada awak bus dan biaya administrasi umum kepada pegawai, ini pun adalah utang macet yang sampai sekarang masih terbawa setelah penggabungan. Lalu ada utang terhadap imbalan pasca kerja dari para kru PPD yang belum dilunasi sebelum penggabungan.

Lalu tunggakan BPJS-TK PPD juga belum dilunasi sampai dengan terjadinya penggabungan. Kemudian, tidak terserapnya permintaan Transjakarta atas kontrak bus listrik karena tidak dapat mengajukan pinjaman atau tidak *bankable*.

Lalu utang PPD kepada pihak ketiga atau orang pribadi, itu sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Kami sudah meminta bantuan juga kepada beberapa pihak termasuk pihak hukum, termasuk juga minta bantuan kepada BUMN untuk menyelesaikan hal ini, tapi masih bisa belum selesai.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bu, Ibu, minta maaf.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Ya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau bisa masuk ke poin-poin yang paling penting *aja, kan* banyak sekali paparan Ibu.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nanti kita baca ini.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang detailnya biar Anggota baca.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Baik, baik, maaf, Pak.

Tantangan yang paling besar mungkin di halaman ini, Pak, atau halaman berikutnya adalah, di halaman berikutnya mungkin yang lain dibaca *aja*, kami telah melakukan audit khusus kepada 25 karyawan Perum PPD, di sini kami mohon dukungan dari, dari seluruh Anggota DPR yang terhormat, seluruh Anggota Komisi VI yang terhormat, agar kami bisa menyelesaikan hal ini.



Jadi audit khusus itu ditemukan keterlibatan 29 eks karyawan dan pimpinan Perum PPD. Jumlah kerugiannya itu 23,199, jadi hampir 24 miliar. Langkah-langkah, kami sudah melaporkan kepada KPK pada tanggal 20 April karena atas, kami juga melakukan, minta asistensi kepada BPKP, karena kami mau melakukannya dengan benar, melaporkan kepada KPK pada tanggal 20 April dan tanggal 12 Mei. Lalu tanggal 12, 29 Mei telah mendapat respons. Lalu kami juga melakukan koordinasi dengan tim kawal BUMN dan disarankan agar DAMRI meminta bantuan BPKP di mana kami lakukan, lalu SPI telah melakukan beberapa kali ekspose atas pemeriksaan ini.

Lalu kemudian, berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP, SPI telah menemukan perbuatan *fraud* terhadap 29 pimpinan karyawan eks Perum DAMRI dengan, eh pimpinan karyawan eks Perum PPD, dengan nilai kerugian yang tadi sudah disebut. Lalu kemudian kami melakukan klarifikasi, tapi ada 10 pimpinan dan karyawan sampai hari ini belum bisa kami klarifikasi karena menolak datang. Lalu kemudian telah mendapat tindak lanjut, ada beberapa yang memang punya niat baik dan mengembalikan dana tersebut sebesar 1,9 miliar atau 85, 8,5%. Dan pimpinan-pimpinan yang belum menandatangani SKJTJM karena belum mau hadir, walaupun kami sudah mengirimkan beberapa kali panggilan, jadi sebelum ini kami, seperti sudah kami sampaikan, kami mengirim surat ke KPK maupun ke BPKP.

Adapun saran yang disampaikan oleh BPKP adalah:

- Satu, melakukan klarifikasi terhadap 10 pimpinan karyawan yang belum dilakukan klarifikasi. Jadi ini ada beberapa, Pak, yang penting adalah bahwa yang B adalah kurang lebih sama, yang A, sama dengan yang tadi saya jelaskan.
- Lalu kemudian yang B, itu ternyata di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri juga masih berproses tindak pidana penipuan dan penggelapan kepada beberapa pihak yang diindikasikan bagian dari upaya pencucian uang yang berasal dari rekening PPD yang melibatkan 19 perusahaan.
- Lalu kemudian yang C, ini juga karena kami harus menyelesaikannya, karena ini ada termasuk kriminal, adalah tercatat utang PPN yang sudah ditarik dari pihak ketiba, ketiga atau disebut WAPU, tetapi tidak disetorkan kepada negara. Utang PPH dan PBB yang belum dibayarkan dengan total sebesar 44 miliar pada tahun Juni 2023.
- Lalu kemudian, dari hasil penelitian BPKP, ada indikasi rekayasa pencatatan keuangan dengan membukukan piutang di depan pada tahun 2019 dari pihak pemberi tugas sebesar 37 miliar, tetapi tidak di *back up* dengan dokumen-dokumen kesepakatan mengenai timbulnya piutang tersebut.
Jadi sampai sekarang kita *dispute* dengan pemberi tugas atau Transjakarta, karena Transjakarta tidak mau mengakui timbulnya utang tersebut karena dokumennya tidak bisa dibuktikan.
- Lalu kemudian setelah penggabungan sampai hari ini, masih terdapat beberapa temuan yang masih dalam proses penyelidikan dengan SPI dan kami terus berkoordinasi dengan BPKP.

Oleh sebab itu, mohon kiranya kami bisa di-*support* untuk hal ini, agar proses-proses tersebut bisa terus bergulir dan berjalan, kami juga tadi sudah minta arahan BUMN untuk menginformasikan hal ini kepada DPR. Kenapa, Pak?

Lalu kemudian, jadi, ada beberapa hal yang utang macet itu adalah karena pada bulan September 2022, itu kami semua, Direksi DAMRI dan Direksi PPD menyepakati bahwa ada beberapa hal yang disepakati pada surat kesepakatan, di mana sebetulnya kami sudah tidak boleh lagi melakukan kedua belah, kedua pihak ini tidak boleh melakukan hal-hal strategis sampai dengan penggabungan dilakukan. Sampai dengan, apa, surat PP-nya keluar, termasuk menerbitkan kebijakan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan organisasi Perum PPD, termasuk, namun tidak terbatas, jadi ini ada surat kesepakatannya pada butir E, termasuk, namun tidak terbatas pada perubahan struktur karyawan dan organisasi, peningkatan remunerasi, gaji dan tunjangan, baik karyawan maupun organisasi Perum PPD.

Tetapi yang terjadi adalah setelah surat pernyataan ini ditanda tangan, PPD menaikkan gaji pegawainya 1,5 sampai 2 kali dari yang sebelumnya, sehingga itu membebani, jadi *merubah* struktur pola penggajian di PPD. Jadi ini yang sebetulnya sering kali menjadi *dispute*, karena pada waktu masuk ke DAMRI, gaji mereka adalah 1,5 sampai 2 kali dari gaji DAMRI, karena dinaikkan setelah kesepakatan tersebut ditandatangani, padahal kalau sebelumnya itu gajinya miriplah, *gitu ya, memper-memper*, kalau orang bilang.

Tapi karena terjadi hal itu, sementara ada utang-utang juga, tapi itu juga, jadi waktu itu mereka dibayar dua kali dalam 1 bulan yaitu tanggal, 18 ya? Tanggal 18 setiap bulan, dan tanggal 25, eh 31, maaf, tanggal 31. Lalu setelah bergabung dengan DAMRI, kami jadi *satuin*, jadi satukan adalah pada tanggal 25. Penggajian dengan sistem, sistem penggajian PPD, itu masih kami lakukan sampai dengan bulan, November ya? Oktober, Oktober 2023. Tetapi karena Perum PPD itu, pertama adalah telah melanggar kesepakatan tersebut, jadi kami kasih waktu transisi 3 bulan. Kedua adalah karena Perum PPD-nya sudah tidak ada secara legal, sehingga saran dari BPKP adalah harus mengikuti formula penggajian DAMRI. Di situlah mulai terjadi *dispute* ya. Jadi yang *udah* sekian bulan dari bulan September 2022 sampai dengan Okto, Oktober ya? Oktober, itu mengalami gaji yang 1,5 sampai 2 kali gaji DAMRI, itu tidak bersedia untuk diturunkan kembali. Tetapi kalau kami meneruskan, kami tidak punya basis hukumnya, Pak, jadi begitu demi, demikian di, di, ya.

Walaupun di buku putih, kalau kita lihat di buku putih, di buku putih itu memang ada di halaman 87, yaitu dalam penggabungan ini sesuai dengan keputusan oleh pemerintah itu tidak ada rasionalisasi atau PHK, ini kami taati. Lalu status pekerja beralih kepada pekerja Perum DAMRI, buku putih halaman 87, beralih pekerja Perum DAMRI dengan ketentuan memperhatikan



masa kerja dan masing-masing pekerja sesuai dengan peraturan yang ada di DAMRI, lalu baru *item* ketiga, tidak ada pengurangan penghasilan dan kesejahteraan pekerja.

Tetapi setelah kami berulang-ulang konsultasi kepada pihak, baik BPKP maupun pihak hukum di BUMN, karena dasarnya sudah tidak ada, jadi kami terpaksa menyesuaikan gaji-gaji yang tadinya sudah 1,5 sampai 2 kali lipat itu, kembali seperti formula dengan PP, eh Perum DAMRI, formula Perum DAMRI.

Lalu kami juga sudah melakukan tanda tangan PKB itu pada Oktober 2023. Jadi, hanya permasalahan ini karena total dari utang tersebut itu cukup besar, Pak, utang macetnya ya, di mana ada bunga-bunga di dalamnya, lalu ada beberapa aspek hukum yang terlibat di dalamnya, ini membutuhkan kami harus men-*set* prioritas. Jadi, yang akhirnya, sebetulnya di tahun 2023, apabila tidak terjadi penggabungan, itu sudah ada beberapa *plan* yang terpaksa harus kami geser karena terjadinya penggabungan, dan kami harus membayar utang-utang macet, yang paling penting utang ini adalah pada pajak PPN yang tidak disetorkan kepada negara, karena setelah berkonsultasi dengan Dirjen Pajak, DAMRI wajib membayar, karena sudah disatukan, walaupun itu terjadi pada masa PPD, karena utang-utang pajak PPN tersebut sudah ditarik dari pihak ketiga, tapi belum disetorkan kepada negara dan itu terjadi di antara 2017 sampai dengan 2022.

Jadi, penyelesaian utang ini, utang, jadi kalau kita lihat, utang-utang ini harus diselesaikan oleh DAMRI secara keseluruhan yang jumlahnya 254. Ditambah lagi beberapa utang yang timbul karena tidak tercatat di buku, lalu kemudian baru ditagihkan kepada beberapa pihak, kepada DAMRI, walaupun waktu itu pada masa pada penggabungan itu kami sudah memberi waktu 40 hari untuk semua orang yang merasa berutang kepada PPD untuk datang ke kami, tapi ternyata mungkin mereka enggak lihat pengumumannya atau apa, jadi masih ada beberapa yang tetap datang kami.

Jadi total itu yang sudah kami bayarkan adalah 28,43 miliar selama 1 tahun ini, dari 254,47. Lalu untuk biaya SDM sendiri, kami sudah mengeluarkan uang sebesar 110 miliar untuk selama 1 tahun ini sejak penggabungan, ada untuk membayar utang gaji BPJS-TK, lalu kemudian DPLK, DPLK. Jadi sekarang kami dalam proses untuk memasukkan Perum PP, eks Perum PPD ke dalam DPLK Mandiri, Bank Mandiri maksud saya, jadi dana pensiunnya Mandiri, karena kami tidak mau mengelolanya sendiri.

Jadi, ini adalah tantangan dan kami, tantangan-tantangan tersendiri yang kami harus selesaikan satu persatu. Sementara pada waktu penggabungan sendiri, efek dari dari Covid itu baru, baru mulai menanjak *tapi* belum *totally recover* kita, Pak, waktu itu. Tapi kita akan jalankan satu-satu sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami. Tapi memang karena, kalau kita lihat yang setelah penggabungan, Pak, data-data penggabungan mungkin bisa dibaca di sini. Tantangan-tantangan ini tidak bisa kami selesaikan dalam waktu cepat, tetapi kami sudah melakukan beberapa



permintaan restrukturisasi, termasuk kepada pajak, termasuk kepada pihak ketiga, termasuk kepada PPA *Finance* di bawah Kementerian Keuangan, lalu kemudian termasuk kepada pihak-pihak nonperbankan atau perorangan, lalu kepada pihak *online*, itu sudah mulai kami *restruck*, jadi kami minta supaya bisa dicicil. Beberapa sudah kami lunasi, Pak, termasuk satu-satunya yang perbankan adalah BTN, sudah kami lunasi pada bulan Desember 2022.

Karena kalau kami tidak lunasi, yang dijadikan jaminan itu adalah bus-bus yang sedang beroperasi, sehingga kami bisa tidak beroperasi apabila, jadi bus-bus PPD yang ada yang digunakan di JRC itu dalam jaminan kepada BTN, sehingga kami harus lunasinya. Karena nanti orang juga enggak bisa kerja kalau bus-bus itu di-*repossess* atau di ambil alih.

Jadi setelah penggabungan kinerja keuangan, ini bisa dilihat di kinerja keuangan setelah penggabungan, Pak. Jadi memang terjadi kenaikan ekuitas, lebih mudahnya kita bisa lihat di grafik selanjutnya, Pak. Jadi, berdasarkan buku putih penggabungan, kami dikenai beberapa target, Pak. Jadi seperti pendapatan pada akhir ..., baik, Pak.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, ya, kalau masih ada poin penting, silakan sedikit saja.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Baik. Jadi intinya, demikian juga untuk aspek keuangan, kami juga, mungkin bisa dibaca sendiri. Pada saat ini untuk capaian, memang kami cukup mencapai sebagaimana yang ditargetkan terhadap *value creation* yang di buku putih, jadi ada beberapa *value creation*.

Lalu strategi juga kami mengikuti strategi yang kita sepakati dengan Kementerian BUMN, itu bisa lihat di halaman terakhir, strategi perusahaan. Jadi kita sepakati dengan BUMN, ini hal-hal ini kita patuhi dan, jadi dari *value creation* yang ditargetkan oleh Kementerian BUMN, itu *Alhamdulillah* beberapa komponen kami bisa mencapai, tapi kalau enggak salah ada satu komponen yang kami belum bisa mencapai.

Itu saja antara lain adalah tadi, pembayaran utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan kerja dengan PPD, terima kasih. Kalau untuk utang-utang DAMRI kepada pihak ketiga, *Alhamdulillah* semua utang lancar, karena semuanya memang dari awal sudah terjadwal dan ter-*schedule*. Demikian Pak, dan kami mohon dukungannya untuk bisa proses ini, karena proses ini tidak mudah, tapi tetap bisa kita jalani kalau kita semangat. Jadi, kami mohon arahan dan bantuan, dukungan dari seluruh Komisi VI untuk bisa menyelesaikan PR-PR kami ini, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,



KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Bu Dirut, kami silakan pendalaman anggota, Pak Deddy Sitorus lebih dulu.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih, Pimpinan, Bu Dirut, dan jajaran.

Saya cuma enggak habis pikir kenapa digabungkan ke DAMRI sebelum masalah PPD selesai ya? DAMRI ini *kan* bukan perusahaan yang, apa maksud *gua* ya, saya ya, stabil banget *gitu* sehingga ketika dimasukkan PPD ke dalam, itu tidak akan terlalu menjadi masalah.

Kenapa DAMRI menerima kemarin ini? Apakah hanya karena penugasan diterima? Kenapa tidak dibuatkan *dulu* tim, selesaikan *dulu* semua urusan PPD, baru digabungkan ke, ke DAMRI. Ini *kan* memindahkan masalah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, sampai borok-boroknya juga diangkut semua, ya, ini *gimana* ceritanya?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Jadi.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Harusnya *kan*, entar *dulu*, Bu.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Maaf, Pak, mohon maaf.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Harusnya *kan* diberesin *dulu* dong urusan ini semua, pakai kurator *kek*, *lawyer kek*, apa *kek*, selesaikan semua masalah hukumnya, tanggung jawabnya. Saya enggak setuju nanti kita *masukin* PMN untuk menyelesaikan dosa-dosa orang ini, padahal semua isinya *fraud* dan segala macam. Negara pada rakyat bertanggung jawab menyelesaikan urusan-urusan ini.

Gimana ceritanya, kalau saya lihat proses dari tadi ini. Ibu sampai minta tolong Komisi VI untuk proses hukum. Salah, Bu, Komisi III itu urusan.



Dan harusnya tanpa dorongan DPR juga, polisi dan KPK ya harus bekerja dan BPKP atau BPK, *beresin dong* barang ini.

Harusnya yang masih sehat dari PPD dibawa ke, ke DAMRI, bukan penyakitnya. Misalnya kemarin, Transjakarta mau diputus, *ya udah* itu langsung masuk dibawa kendali DAMRI, itu masuk akal. Sekarang statusnya *gimana* dengan Transjakarta, Bu? Sudah putus kontraknya semua?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Transjakarta itu di bawah BUMD, Pak, mungkin Bapak salah, JRC kali ya, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Bukan, ini yang di sini.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Jabodetabek Residential Connexion.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

102 unit bus Transjakarta, bulan April 2002 potensi berakhir kontrak.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Oh, oh mohon maaf.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Agustus.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Iya, 277 itu, jadi waktu putus, lalu kami, karena sudah penggabungan, kami kembali ke Transjakarta, untuk semacam ikut tender lagi, Pak. Jadi, akhirnya kami mendapatkan operasional sejak bulan Oktober 2023, itu sebanyak 277 bus. Angka 277 bus itu hasil penelitian dari EVDAL atau Evaluasi dan Pengendalian Transjakarta terhadap bus-bus PPD yang masih layak untuk dioperasikan, jadi tadinya kan 347.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

48.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

348 *sorry*, maaf, maaf Pak, 348 bus, tapi karena sudah habis dan setelah diteliti ulang, hanya 277 dan itu pun.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Yang masih layak?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Kami perbaiki, yang masih layak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Jadi masih lanjut sampai tahun ini? Sampai sekarang?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Sampai dengan Oktober tahun ini.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Di sini habis bulan Agustus 2023, berarti dengan *review* mereka itu akhirnya sampai 2024?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

2024, bulan Oktober.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Oktober.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Tapi jumlahnya hanya 227.



F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Oke. Dan itu punya PPD, bukan DAMRI?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Kan *udah* enggak ada PPD lagi, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Loh iyalah, *tapi bis* yang beroperasi itu masih asetnya PPD?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Iya, eks PPD.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya, *okeelah*. Nah, pertanyaan saya, kenapa sebelum penggabungan, ini urusan semua enggak *diberesin*?

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bu, didengarkan *dulu aja* pertanyaannya, kecuali interaktif. Ditampung *dulu*.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya, itu pertanyaan saya. Ini *kan* termasuk pertanyaan kepada Kementerian BUMN, kenapa barang rusak dikasih sama barang yang enggak terlalu bagus? DAMRI tidak rugi *aja* kita sudah bersyukur, Bu, terus dikasih penyakit kayak begini, ini *kan* aneh, tolong *dong* sampaikan dari Komisi VI mempertanyakan, kenapa ini? Gimana tanggung jawabnya Kementerian BUMN, harusnya ini barang *kan* disapah *dulu*, *diberesin*, di-*restruck*, di apa, kalau perlu dijual asetnya untuk membayar semua kewajibannya, bukan dibawa ke sana.

Karena saya lihat untuk aset pun, Ibu banyak masalah untuk pakai asetnya dia. Lalu sebenarnya gunanya untuk apa ini barang, ya? Saya setiap hari di medsos saya, Bu, rutin, dua-tiga orang *tuh* pasti nanya, "Pak, bantu kami Pak, DAMRI belum digaji", di beberapa tempat di Indonesia. Saya enggak tahu yang dimaksud itu DAMRI atau PPD saya enggak tahu, karena setahu saya PPD hanya di Jakarta, bukan? Iya *kan*, ini apakah ada masalah lain *nih* di DAMRI?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Oh, enggak, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya, karena banyak yang me-langsung me-*mention* soal DAMRI di akun medsos saya, dan itu tidak sekali-dua kali, itu sekali, setiap hari pasti ada. Dua-tiga orang nanya, "Tolong, Pak, perjuangkan kami karyawan DAMRI", *gitu*. Nah jadi, saran saya, Bu, ya, sekarang sudah enggak ada PPD, sekarang jadi deritanya Ibu *kan* ya, ini proses hukum benar-benar *diselesain*, Bu.

Jangan keluhannya yang dibawa ke kami. Apa yang sudah dilakukan? Dan apa ke depan ini targetnya apa? Kalau enggak, kita lempar balik barang ini ke kementerian. Biar *aja* mereka bentuk tim kurator buat *beresin* ini, masalah ini, jangan dibebankan perusahaan yang sudah enggak lari kencang. Ini *kan* salah kalau menurut saya. Jadi proses hukumnya dikejar terus, Bu, kalau menurut saya.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Baik, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya, ini jangan, ya kita jangan lemahlah, kalau menurut saya. Enggak salah Ibu nolak *kok* Kementerian BUMN, "Pak, ini tolong *diberesin*, Pak, saya enggak mau, jadi kami bebannya ini urusan hukum segala macam", ya, litigasi harus dibantu juga oleh Kementerian BUMN, itu yang pertama.

Yang kedua, menyangkut bisnis DAMRI, tentu kita tidak berpikir bahwa ini di rute-rute yang secara faktual, swasta sudah bisa berperan. Cuma saya pengin tanya, sebenarnya apa enggak bisa *sih* ada model bisnis dari DAMRI ini untuk mengisi *market-market* yang sebenarnya relatif bisa membantu.

Ambil contoh, Pertamina itu punya banyak proyek di mana-mana, ada *bis* karyawan atau segala macam, memang enggak bisa kerja di situ? DAMRI, misalnya. Atau angkutan di dalam, di dalam, apa namanya, Pelindo atau segala macam ya, di terminal penumpang misalnya, ya, atau rute khusus dari, apa namanya, dari stasiun kereta ke tempat-tempat tertentu, ini kan harus inovatif Bu, memanfaatkan peluang-peluang ini, *gitu loh*.

Jangan hanya menjalani apa yang sudah dijalankan belasan tahun, enggak akan ke mana-mana, ya *segitu-gitu aja*, *kan* harus cari terobosan. Tiap kementerian, tiap BUMN itu *leasing*, Bu, dari mulai mobil Dirut sampai mobil karyawan, DAMRI di mana di sana, apa enggak ikut *bidding*? Iya *toh*?



Itu *kan* semua kementerian itu *kan* punya *bis* karyawan-*bis* karyawan, *ngapain kan*, kalau dia *leasing* dari DAMRI, enggak keluar operasional, segala macam.

Ini menurut saya perlu dipikirkan, Bu, ya, sebagai salah satu peluang kita *gitu*. Saya kasihan *aja* lihat DAMRI ini dikasih sampah *kayak* begini. Harusnya dari awal *clear*, "Kalau semua masalah enggak diberesin, ya kami enggak mau ambil", terserah mau diganti, kalau enggak *kan* ini namanya beban. Dan sekali lagi saya enggak mau itu PMN dipakai buat *beresin* ini, urusan PPD. Kalau perlu asetnya *diberesin* semua, dijual, semua orang yang melakukan *fraud* masuk penjara atau maju ke muka hukum, baru kita ambil, ya. Masa virus dibawa masuk ke tubuh kita, *kan, gimana sih, gitu*, Pimpinan, *makasih*.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih, Pak Deddy.

Selanjutnya dari sebelah kanan, Pak Harris Turino, semangat, Pak Harris.

F-PDIP (Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M.):

Asyik, terima kasih, Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Ibu Direktur Utama Perum DAMRI,**

Saya dari tadi juga menyimak presentasi Ibu, ini mau larinya ke mana ini, ya? Ternyata persis seperti yang dikatakan oleh rekan saya, bahwa Ibu ditugaskan untuk menerima penggabungan dari perusahaan yang sakit, sementara kondisi keuangan DAMRI sendiri, kalau kita lihat, sangat tidak *preferable* Bu, ya.

Ketahanan kasnya 48 hari, *debt to equity rasio*-nya masih di atas 1, 1,3, kemudian DAR-nya 1,8, perusahaan ini bukan perusahaan yang sehat. Nah, sekarang Ibu menerima penggabungan perusahaan yang jelas-jelas sakit. Kalau kita lihat, *debt to equity rasio*-nya DAMRI 3,9, ya, ini agak aneh kalau kemudian perusahaan yang tidak sehat harus menyelamatkan perusahaan yang sakit.

Saya coba memahami dari tadi, masih susah untuk mengerti, Bu, karena angka-angkanya ini menarik. Ada utang macet saja sebesar 254 miliar, macet ini, utang PPD kepada pihak lain, gede sekali ini, untuk kelas PPD, sementara total asetnya hanya 410 miliar. Nah, kalau kita kembali lagi ke posisi DAMRI, aset lancarnya DAMRI 145 miliar, 2022, sementara likuiditas jangka pendeknya, 151, berarti *kan* aset lancar *ndak* mampu

menutupi likuiditas, liabilitas, maaf, maksud saya, ya. Nah, perusahaan seperti ini harus *ngobati* ini, ilmunya dari mana, Bu, ya?

Maka benar seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi, seharusnya dari awal dikatakan bahwa, ini dibereskan *dulu*, direstru *dulu*, disehatkan *dulu*, penyakitnya dibuang *dulu*, yang jelas sebelas *fraud* berarti harus dihadapkan kepada hukum, baru digabungkan kepada DAMRI. Karena kalau tidak, ya masalah Bu, konsep penggabungan atau merger *kan* seharusnya *value creation*, yang namanya *merger* itu $1 + 1 = 3$, karena ada sinergi yang muncul.

Kalau kita lihat dari paparan Ibu yang di bagian belakang, sinerginya belum muncul. Kita lihat pendapatannya 2022 ,1 triliun, 2023 1,5, betul? 1,55. Tapi kita lihat labanya Bu, ya *kan*, 2022 46 miliar, 2023 malah turun, pendapatannya tambah besar, labanya tambah turun, liabilitasnya tambah besar, nah, apa gunanya penggabungan ini? Sehingga saya tidak melihat adanya sinergi yang muncul dari penggabungan ini.

Jadi, rasanya ini perlu ditata, Bu, jangan sampai nanti Ibu yang kena dampaknya *loh*. Kalau *ndak* bisa diselesaikan, Ibu yang harus menyelesaikan, dan ternyata timbul kerugian negara di tangan Ibu, risikonya *kan* gede juga, Bu, ya, ini mengenai mergernya.

Mengenai beberapa masukan dari rekan-rekan yang juga mengirimkan pesan kepada saya ya, banyak sekali di DAMRI sendiri masalah yang belum terselesaikan, misalkan, mohon diklarifikasi, apa benar masih ada penggajian pegawai yang di bawah UMR, ya? Kemudian banyak status yang belum jelas, pekerja PKWT yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Ini banyak masukan ke saya, termasuk juga keluhan dari PPD yang gajinya dipotong, tapi tadi Ibu sudah jelaskan, melanggar buku putih, kesepakatan ketika merger. Tetapi Ibu tadi sudah jelaskan, bahwa memang tidak mungkin menerapkan *tiers* yang berbeda ya.

Kemudian mengenai pola karier, Bu, banyak yang memberikan masukan, bahwa beberapa pegawai tidak diberi kesempatan untuk naik ke jenjang karier. Yang belum berpengalaman bahkan dengan mudah mengisi jabatan-jabatan struktural, mohon dikonfirmasi, karena ini barang masuk ke saya. Saya *ndak* tahu isi perutnya DAMRI, satu contoh saja, sekretaris dirut yang diangkat menjadi Kasubdiv, apakah ini benar? Nah, ini menimbulkan juga keresahan di antara karyawan perusahaan.

Nah, juga mengenai gaji-gaji yang tertunda di DAMRI. Tadi Ibu juga sudah paparkan, saya dapat datanya di Bandung kira-kira 9 miliar, Bu, di Palembang 1,5 miliar, di Surabaya 3 miliar, apa benar memang masih ada gaji-gaji yang tertunda, kalau benar, apakah ini *melulu* akibat Covid?

Dan yang terakhir, mengenai ada data di Bareskrim, yang saya rasa nanti saya sampaikan secara terpisah, mengenai, ya perilaku direksi.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Baik, dari sebelah kiri, Pak Husni, silakan.

F-P.GERINDRA (MUHAMMAD HUSNI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh jajaran Komisi VI,
Yang saya hormati Direktur Utama Perum DAMRI dan seluruh jajarannya,**

Tadi apa yang Ibu Dirut paparkan, ini hebat, Bu, ini semuanya masalah-masalah keuangan. Tapi ada yang aneh, Bu, waktu DAMRI mengakuisisi PPD, yang sudah pasti, yang sudah pasti, ini tidak dilakukan *due diligence* ya, apakah PPD-nya itu rodanya ke atas ataupun ke bawah? Ban-nya sudah *gundul* semua ya? Semuanya ini ada, ada, ada, ada, ada nilainya. Atau kendaraan itu enggak ada baterai, Bu, enggak ada minyak? Bisa-bisa mesinnya mungkin juga enggak ada, ya.

Tapi saya lihat pihak DAMRI ini sangat *pede* sekali mengakuisisi, setelah diakuisisi, kalau saya lihat *nih* yang diakuisisi ini barangnya bukan *plus tapi minus* nih Bu, ya, secara keuangan nih *minus*. Kalau saya di Medan boleh mengibaratkan ya Bu ya, ini seperti keledai, dia menarik beban, jalannya menanjak pula.

Jadi, sebagai perusahaan jasa angkutan, angkutan penumpang ya, permasalahan di trayek jalanan ini sangat luar biasa, Bu, sangat banyak permasalahan sekali, memang kita sudah melihat ya, DAMRI bukan hanya angkutan antar kota, tapi juga, apa, antar provinsi, malah saya baca di sini sudah ada yang antar negara, ya, Bu, ya.

Tapi dari *analisa* yang saya baca, apa yang Ibu sampaikan ya, seperti, ini kenapa enggak ada halamannya *nih* ya, aset lancar Perum PPD, piutang sebesar 37 miliar, sudah dibukukan oleh PPD pada tahun 2019, sementara pihak pemberi pekerjaan tidak mengakui adanya piutang tersebut, karena PPD tidak dapat membuktikan data dimaksud. Ibu berani paparkan seperti ini. Yang kami tahu, inilah jelas *due diligence* itu tidak, apa, Perum DAMRI laksanakan, dan ini aspeknya bisa ke mana-mana. Ini belum lagi ya, Bu, ini mohon maaf ini, Bu, gaji ya, gaji 2022 42,43 miliar, semester 1 23-32,74,



sedangkan pesangonnya hampir sama dengan gaji, hampir, hampir 100% ini, Bu. lini perusahaan sehebat apa pun kalau hal-hal seperti ini dilaksanakan, ini bisa *kolaps* dari *dulu*, ya.

Belum lagi kita lihat ini, sebelum penggabungan, permasalahan-permasalahan banyak sekali *nih*, cakupan wilayah bisnis lebih 90% pendapatan ya, isu PPD terkait kerja sama, ini, saya pikir ini, saya, bukan saya pikir, saya lihat ini banyak hal yang fiktif ini, Bu, ya, banyak hal-hal yang fiktif.

Belum lagi utang biaya akrual PPD kepada awak bus dan biaya administrasi umum. Luar biasa *nih*, bisa berutang pula PPD-nya sama *supir*-nya *nih*. Belum lagi tindakan-tindakan *fraud* yang dilakukan oleh PPD, *tapi* yang hebat, kenapa bisa tergabung ini, ini jelas, Bu, ya. Ada perbankan, Bu, begitu mau dia dilakukan merger, kita tahu, Komisi VI ini, ada masalah, kita langsung memberitahukannya. Tapi ini, ini *kan* sudah terlaksana *nih* semuanya, Bu, ya, ini sudah terlaksana *kan*? Nah, saya *ndak* tahu siapa konsultan dari DAMRI yang bisa melakukan penggabungan dengan adanya permasalahan hukum, ada permasalahan aset, ada permasalahan pihak ketiga, lagi.

Kemudian *nih* saya lihat *nih*, strategi perusahaan, Bu, *nih* mohon maaf, Bu, ya, yang ketiga, peningkatan bisnis berkelanjutan, itu poin 3D, penambahan pendapatan melalui sinergi dengan BUMN, swasta, dan BPKH. BPKH Ibu tahu? Itu kasir dari Kemenag, Bu, dia enggak ada urusan-urusan begini, itu urusannya sama Kemenag, Bu, ya, tolong nanti itu *dirubah* itu. Karena saya *dulu* mantan Komisi VIII, tahu tugas masing-masing daripada mitra kami di komisi.

Jadi, di sini juga Ibu, ya, karena, apa, apa, DAMRI ini *kan* moda transportasi darat ya, tapi di dalam laporan keuangan, Ibu tidak, tidak, tidak cantumkan, bagaimana pendapatan di wilayah yang seperti AKAP ya, atau bagaimana subsidi untuk wila, apa, wilayah-wilayah terpencil. Karena yang setahu saya, DAMRI ini bukan hanya mencari keuntungan dari angkutan darat, tapi juga ada tugas-tugas sosial yang diberikan oleh negara supaya transportasi darat ini bisa dalam berjalan baik.

Jadi, saya juga tadi setuju dengan teman-teman, bahwa kita bukan hanya terpaku di angkutan kendaraan yang isinya seperti bus atau SOV, apa, SUV ya, Bu, ya? Ya apa, bisa juga kepada bisnis kepa, ya, kendaraan-kendaraan, yang banyak digunakan, seperti mobil sedan dan lain sebagainya, saya rasa itu *aja* Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Bu Nevi, silakan, Bu.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Makasih.

Pimpinan dan Anggota dan Komisi VI yang kami hormati,

Bu Dirut, jadi dengan laporan yang telah Bu Dirut sampaikan, kalau kita lihat, bahwa untuk pencapaian ke depannya agak berat, Ibu, apalagi kita ditargetkan pasca merger dengan Perum PPD, Perum DAMRI menargetkan pendapatan tembus 2,3 triliun dan laba bersih tembus 98,8 miliar di tahun 2027. Tentu Ibu dengan permasalahan yang ada yang tadi sudah disampaikan, bagaimana strategi Ibu untuk mencapai pendapatan tembus 2,3 triliun tersebut? Dan langkah apa yang Ibu harus lakukan ke depan ya, ke dalam korporasi maupun keluar, mengingat tingkat persaingan dalam industri transportasi darat *semakin* kompetitif.

Mungkin kita melihat, contoh KAI, Bu, ya, kereta ya, jadi kemampuan direksi korporasi dalam melakukan pembaharuan itu harus menjadi contoh juga bagi korporasi angkutan lainnya. PT KAI sebelumnya merugi, kini berhasil laba. Nah, bagaimana direksi Perum DAMRI melakukan pembenahan manajemen dan SDM dalam meningkatkan kinerja korporasinya? Dan bagaimana pula Perum DAMRI juga menciptakan lapangan kerja?

Apalagi, Bu, kita baru-baru ini sering mendengar kecelakaan bus pariwisata yang membawa pelajar dalam kegiatan studi tur, ini harusnya menjadi tantangan buat DAMRI untuk masuk, ya, ke dalam pangsa pasar ini, ya, sehingga Perum DAMRI hadir ke masyarakat sebagai solusi dalam angkutan darat, khususnya dalam wisata pelajar ke sejumlah destinasi dengan aman ya, dan keselamatan yang prima, dan juga sebagai angkutan transportasi milik pemerintah, ya.

Tadi kita *udah* dengar di daerah 3T itu diberi kesempatan DAMRI untuk me, me, me apa namanya, beroperasi. Nah sejauh mana Perum DAMRI melakukan koordinasi dengan pihak-pihak ya, Menhub, PUPR dan yang lainnya pemerintah daerah ya, untuk beroperasi di daerah 3T tadi ya, itu saja Pimpinan.

Terima kasih.



WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, *makasih*, Pak Husein.

F-P.GERINDRA (M. HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., M.B.A.):

Terima kasih,

**Pimpinan, Pak Martin dan juga Pak Sarmuji yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Bu, Ibu Dirut beserta dengan jajarannya,**

Saya menambahkan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ya. Yang pertama mungkin, kalau melihat kondisi yang Ibu paparkan pada siang hari ini mengenai merger dengan PPD, ini memang suatu hal yang saya kira seperti apa ya, benang kusut ya, benang kusut, karena di transportasi itu, darat khususnya, apalagi di *bis* ya, seperti ini memang, kalau sudah seperti ini harus betul-betul ada tindakan yang, apa namanya, yang ekstrem harus dilakukan, kalau tidak dilakukan tindakan ekstrem, saya rasa, ini mohon maaf, agak sulit untuk bisa selamat ya.

Lalu selanjutnya, saya juga sepakat bahwasanya, ini harus ada *roadmap business yang* jelas, yang nantinya akan dijalankan oleh Perum DAMRI ya, setelah merger ini. Karena yang kita tahu Bu, mungkin 5, 10 tahun ke belakang ini sampai sekarang, trennya itu kita tahu, tren itu sekarang sudah mulai beralih ke *by the service* seperti Transjakarta ya, tadi juga di *mention* oleh, disebutkan oleh teman kita mengenai kontrak di Transjakarta. Ya itu juga salah satu contoh BTS, *by the service*, juga mungkin ada di beberapa wilayah-wilayah ataupun daerah-daerah lain, yang saya kira kalau berbicara mengenai bisnisnya ini yang harus PT DAMRI bisa, apa namanya, akselerasi untuk bisa mendapatkan kontrak-kontrak ini daerah-daerah, yang penting itu *by the service*.

Lalu, mungkin saya juga melihat mengenai adanya PPD ya, yang ada di Transjakarta, saya rasa untuk kontrak-kontrak di Transjakarta ini, mungkin mengapa tidak diperpanjang atau memang PPD atau DAMRI belum mendapatkan kuotanya lagi, saya rasa ini karena kondisi keuangan DAMRI ataupun PPD ya. *Kan* tidak mungkin pemberi pekerjaan itu asal memberikan, walaupun ini bisa dibilang, ya ada sinergilah antara lembaga ataupun, apa namanya, ya ini kan BUMN, di sana mungkin pemerintah, BUMD ya. Namun *kan* secara bisnis tetap saja itu menjadi salah satu patokan ya, kalau tidak memang perusahaan ini tidak sehat, ya tidak mungkin Ibu bisa mendapatkan kontrak-kontrak kerja dari, baik itu dari swasta ataupun dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya. Jadi yang perlu diperbaiki ya saya rasa memang secara internal dulu Ibu perbaiki, seperti apa, keuangannya perlu diperbaiki.

Karena saya tidak tahu ya, Bu, apakah DAMRI atau PPD itu pada saat mendapatkan kontrak dari Transjakarta, apakah itu investasi uangnya dari



pemerintah atau memang itu dari hasil laba yang ada dari perusahaan tersebut. Nah, yang saya lihat mungkin ke depan, karena ini memang sudah seperti, apa namanya, benang kusut ya, ini agak sulit memang untuk bisa memperbaiki, namun perlu waktu dan juga, apa namanya, perlu waktu dan juga perlu keseriusan dari teman-teman di DAMRI.

Mungkin bisa juga saya berharap ini nanti fokus ke depan, karena memang DAMRI juga selain harus memberikan, apa, menghasilkan laba keuntungan, juga ada yang namanya penugasan-penugasan dari pemerintah. Saya juga berharap sebetulnya DAMRI bisa fokus juga di penugasan-penugasan yang diberikan, karena itu bisa menjadi percontohan, Bu. Ibu pada saat penugasan biasanya pasti diberikan modal oleh negara, betul ya, betul enggak? Terkadang ada, ada, betul tidak? Iya nanti, ada *kan*? Maksud saya, dari penugasan-penugasan ini *kan*, ini kebocoran-kebocoran Ibu sampaikan di sini *nih*, ini ada masalah hukum karyawan ini, karyawan itu, saya rasa ini pasti dari pekerjaan-pekerjaan salah satunya yang memang itu juga bersumber dari penugasan-penugasan yang diberikan oleh negara kepada DAMRI ataupun PPD *nih*, jadi saya berharap ini ada perbaikan juga.

Jadi, agak sulit rasanya kita berbicara, tadi teman-teman mikirkan model bisnis yang lain seperti apa, ya tidak akan mendapatkan apa-apa *gitu*, dari, apa namanya, pekerjaan lain, kalau memang kondisi perusahaannya ini tidak baik, Bu. Saya tahu, mungkin *rute* yang paling, apa namanya, paling bisa dibilang memberikan keuntungan yang cukup besar adalah rute-rute bandara, betul ya? Rute-rute bandara, mungkin dari Soekarno Hatta, *point to point* ya, Ibu juga punya rute-rute yang *shuttle*, *point to point*, itu yang saya rasa juga cukup bisa memberikan kontribusi secara keuangan.

Namun, karena memang di sini tadi disebutkan ada PPD yang dimerges dengan DAMRI, ya ini menjadi PR yang lebih berat lagi. Mungkin sebelumnya DAMRI juga mengalami kesulitan yang sudah cukup, karena aset-aset DAMRI juga cukup banyak yang *idle*, Bu. Kalau, mungkin perusahaan lain menggunakan aset-aset itu yang *idle-idle* itu tidak sebentar, tidak 1, 2, 3 tahun itu didiamkan, tapi benar-benar cepat diputarkan, memikirkan bagaimana aset-aset yang banyak ini, ya supaya bisa menghasilkan kontribusi kepada perusahaan.

Contoh di dapil saya, Bu, ada aset DAMRI yang sampai saat ini terbengkalai. Dari zaman almarhum kakek saya sampai sekarang, mungkin itu aset di depan tukang jualan ini, Pak Martin, di depan tukang jualan ketupat, ketupat sayur eh ketupat, ketupat, itu terkenal, pernah mungkin Ibu ke sana. Itu *idle* Bu, saya tahu, Bu. Saya kalau pagi kadang kalau di Tasik makan ke sana, Bu, ini katanya punya DAMRI, sekarang sudah *idle*, itu salah satu contoh.

Jadi banyak sekali sebetulnya, apa, yang bisa dikembangkan, yang bisa dipikirkan, terutama aset-aset yang *idle*-nya dulu ini, Bu, seperti apa, terutama tanah-tanah itu, aset-aset itu, yang memang punya *value*, punya nilai yang bisa dijual, yang bisa menjual, yang bisa untuk menutupi



kekurangan-kekurangan ini. Karena fokusnya ini *kan*, DAMRI ini, ya perusahaan angkutan darat ya, darat itu berarti asetnya salah satunya *kan bis* ya ataupun alat-alat transportasi seperti *bis* atau *shuttle*.

Sekarang usia *shuttle* ataupun usia *bis-bis* Ibu sudah berapa tahun? Apakah sudah waktunya masuk ini ke dalam peremajaan atau belum? Kalau Ibu tidak bisa, indikatornya sangat mudah, Ibu tidak bisa meremajakan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan umurnya, ya kita berbicara rute yang non-PSO-lah katakanlah, berarti *kan* di sini trayek ataupun rute tersebut bisa dikatakan ini tidak menguntungkan, Bu, ataupun ada kesalahan. Mungkin menguntungkan, *tapi* ada kesalahan dalam mengelola trayek tersebut, itu juga bisa menjadi masalah, Bu.

Jadi, intinya saya tentunya memberikan dukungan kepada teman-teman di DAMRI ya, ini memang PR tugas yang sangat berat. Saya juga berharap Ibu kalau, kalau ada keluhan-kesah itu juga bisa disampaikan juga kepada Kementerian BUMN. Tidak sanggup, ini berat, Ibu juga harus proaktif memberikan masukan ya, jangan hanya kami teman-teman di DPR. Tentunya, kami selalu mendukung kepada perbaikan-perbaikan ya, namun di sisi lain juga Ibu harus berani memberikan tanggapan, memberikan masukan, jujur kepada Kementerian BUMN ini kondisinya seperti ini. Jangan, iya, iya, iya, padahal memang tidak bisa, sudah sulit. Jadi, ada pemikiran ataupun ada nantinya strategi lain yang akan dikembangkan, yang akan nanti dipikirkan oleh Kementerian BUMN, yang meminta Ibu tentunya, ini *kan* atas arahan dari Kementerian BUMN untuk merger ini *kan*, Bu, bukan dari inisiasi Ibu sendiri. Itu saja pimpinan dari saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Husein.

Pendapatnya Pak Husein tadi layak didengar Bu, karena dia pengusaha bus, Bu. Busnya juga jumlahnya mungkin enggak kalah sama DAMRI itu.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sangat teknokratis.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dan berhasil mengantarkan Pak Husein menjadi anggota DPR RI juga, itu *kan* luar biasa itu.



Silakan selanjutnya, Bu Nevi sudah ya? Sudah ya.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sudah.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Berarti sudah selesai. Pak Martin, silakan.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih, Pak Sarmuji.

Ini DAMRI pasca penggabungan *kayaknya* baru ini lagi kita rapat, ya, Bu, ya? Pasca penggabungan. Mungkin ada sedikit semacam kronologis, karena saya lihat beberapa kawan-kawan yang ada di ruangan ini, mungkin pada waktu itu masih bertugas di komisi lain.

Memang pada waktu penggabungan atau rencana penggabungan PPPD ke DAMRI ini pernah dipaparkan oleh Pak Menteri pada waktu itu. Tapi kemudian belum pernah kita bahas secara detail terkait dengan kondisi masing-masing perusahaan sebelum penggabungan. Jadi, apa namanya, yang tadi Ibu Dirut paparkan mengenai kondisi keuangan atau kondisi perusahaan PPD yang seperti itu, kami memang tidak tahu sedemikian dalam persoalannya, ya. Jadi saya pikir rapat kali ini membuka banyak hal, bahwa memang banyak persoalan yang harus diselesaikan terkait dengan penggabungan PPD dengan DAMRI ini.

Walaupun kalau saya lihat kinerja secara umum pasca penggabungan, ini kalau kita lihat di grafik ini, Bu, ya, sebenarnya tidak ada yang menjadi langsung turun ya, Bu, ya, baik dari aset ya, laba juga ya, naik ya, walaupun liabilitas naik juga *gitu* ya, aset juga naik, ekuitas juga naik. Artinya *gini*, Bu, *cuman* persoalannya sekarang, kemarin Pak Menteri BUMN memaparkan salah satu usulan PMN 2025 adalah DAMRI untuk penyediaan bus listrik.

Nah, ini ada waktu, ya, Ibu Dirut, dari mulai sekarang sampai dengan mungkin nanti ini pembahasannya setelah nota keuangan ya, setelah nota keuangan 17 Agustus. Jadi, Ibu Dirut bisa berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk memiliki agenda penyelesaian masalah-masalah ini dengan lebih solid ya, jadi, karena nanti ketika pendalaman untuk pengajuan PMN, tentu kalau solusi terhadap masalah-masalah ini masih belum kita temukan secara solid, nanti akan juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi, Bu Dirut ya, untuk keputusan di masalah PMN ini.

Karena memang terus-terang banyak juga, tadi kalau Pak Deddy mengatakan komentar di medsos dan lain sebagainya, memang banyak yang masuk terkait dengan persoalan karyawan ya, saya enggak tahu apakah itu karyawan DAMRI ataukah eks PPD.

Jadi, saran saya, Bu, supaya segera Ibu dengan Kementerian BUMN berkoordinasi, untuk penyelesaian agenda permasalahan terkait dengan penggabungan ini, dan juga masalah karyawan di PPD ya, sebelum kita mulai masuk dalam rapat untuk pembahasan pengajuan PMN untuk DAMRI, ya. Saya pikir itu catatan dari saya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih.

Dari *floor* sudah, *Teh Rieke* mau *nanyain*?

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Boleh.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Boleh, banyak juga boleh, *nih* rapat atas permintaan *Teh Rieke*.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Pak Sarmuji jangan *gitu dong*, Pak Sarmuji ini naik haji bareng jangan lupa *Ioh*, kita berdoa di depan Ka'bah sama-sama untuk kemaslahatan umat, dicatat sama Allah itu.

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

Maaf atas keterlambatan, karena ada hal yang agak sulit untuk digeser, Direktur Utama Perum DAMRI dan semua yang hadir, terima kasih untuk pemaparannya tadi, saya sudah mendapatkan *updat*. Intinya titip ya, Bu, ya, titip untuk yang hak-hak karyawan, begitu, termasuk dengan BPJS. Apalagi kalau memang, kalau tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS itu sanksinya pidana, kalau sudah didaftarkan tapi ternyata potongan upahnya tidak masuk ke BPJS, itu lebih pidana lagi. Saya yakin Ibu amanah, dan mungkin juga pihak yang bersangkutan soal ketenagakerjaan di DAMRI bisa mengurai data yang lebih lengkap.



Saya setuju dengan Pak Martin, bahwa persoalan, khususnya soal beberapa pekerja yang bermasalah, kita bicarakan lagi dan menjadi bagian dari pertimbangan untuk PMN, kita siap *support* Bu.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ternyata singkat *beneran*.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kirain mau.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya pikir mau panjang marah-marah *gitu*, ternyata enggak.

Baik, terima kasih *Teh Rieke*.

Saya sedikit *aja*, Bu, ini Pak Martin tadi sudah membuka data keuangan dan kinerja keuangannya, relatif tidak buruk-buruk amat, pendapatan meningkat, EBITDA kalau enggak salah juga meningkat, tapi satu pertanyaannya, apakah hal ini dikarenakan karena proses penggabungan atau karena faktor lain?

Karena kalau kita lihat dan menengok ke belakang sebentar, ini *kan recovery* pasca Covid, dan trennya, pasca Covid memang meningkat. Jadi, ada atau tidak ada penggabungan, kelihatannya meningkat. Apakah peningkatan itu justru tertahan oleh penggabungan, sehingga peningkatannya tidak menjadi pesat, atau justru penggabungan itu memiliki kontribusi terhadap proses peningkatan kinerja, salah satunya tadi pendapatan, EBITDA, tapi liabilitasnya juga naik, kalau liabilitasnya jelas ini karena faktor penggabungan kelihatannya.

Kami persilakan, Bu, untuk bisa memberikan jawaban atas pendalaman para anggota.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Terima kasih, Pak Ketua.



Mungkin saya coba jawab singkat, tapi satu-satu. Jadi kalau dilihat dari komposisi propor, atau proporsi dari pendapatan di DAMRI, itu 90% adalah *komersil* dan 10% adalah *project*, proyek dari pemerintah. Jadi itu biasanya dari Kementerian Perhubungan, berupa perintis dan perintis KSPN istilahnya, jadi pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang memang belum tumbuh ya, kami punya dua, tapi itu bukan penugasan, Pak, jadi kami harus ikut tender setiap tahun dan tendernya per tahun.

Sehingga agak sulit kami untuk memperbaiki armada-armada, karena enggak *bankable* istilahnya, Pak, jadi, sementara armada itu harus kami beli sendiri. Jadi tadi pertanyaannya Pak Husein sekalian menjawab, apabila kami dapat *project* ini, itu tidak dibiayai oleh pemerintah, Pak, tapi dari investasi dari putaran bisnis ini.

Jadi kalau dari komposisi, 90% itu komposisi dari *komersil*, seperti antarkota, apa, lintas batas negara, itu yang paling tinggi, lalu kemudian bandara, angkutan bandara di 25 titik bandara. Lalu kemudian untuk yang, jadi memang dari, *gini*, PPD itu memiliki kuota yang karena dulu dia beroperasi sebelum terjadinya Transjakarta, sebanyak 497 bus kuotanya, tetapi yang dilayani hari ini hanya 227. Lalu kemudian setelah bergabung dengan DAMRI, kami memiliki 26 bus listrik untuk Transjakarta, tapi setelah bergabung. Jadi, jadi baru 297 tambah 26, masih tersisa kuota yang sisanya, yang ini karena aturan dari Pergub, kami harus mengkonversikannya, bukan lagi bus *combustion*, tetapi harus bus listrik, Pak. Jadi oleh sebab itu, memang kami minta, apabila 497 bus ini kami bisa *convert* sebelum 2026, *Insha Allah* ini akan baik, kondisi keuangan.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Berapa bus, Bu, yang mau jadi listrik?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Total kuotanya 497, yang sudah dikonversi baru 26. Jadi sisanya 227 bus ini masih *combustion* yang lagi jalan, yang akan habis di bulan Oktober. Jadi nanti Oktober selesai, kami sudah harus menggantinya dengan bus listrik. Nah, kalau dari skema pembayaran Transjakarta, *Alhamdulillah* itu cukup baik, jadi ini akan memperbaiki rasio-rasio keuangan dari DAMRI, secara keseluruhan ya, bus listriknya totalnya 497 dan

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Di-*convert* atau baru?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Baru, Pak.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baru.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Maksudnya konversi sistem, Pak, jadi, apa, berubah menjadi dari *combustion* menjadi bus listrik atau BEB, *Battery Electric Bus*.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, jadi bus yang ada sekarang?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Masih.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tetap operasi nanti?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Enggak. Jadi, nanti setelah Oktober, bus *combustion* itu enggak boleh ada lagi, Pak, bus yang diesel, itu harus diganti dengan, kalau DAMRI mau terus beroperasi di Transjakarta, dia harus mengganti dengan bus listrik, jadi *by* Desember tahun lalu

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Maksud saya berarti *kan* itu bus baru ya?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Bus baru, Pak.



WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nah, yang bus yang lama?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Nah.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dijual?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Untuk bus lama, sementara ini karena penghasilannya dari waktu PPD bergabung, *kan* bisa dibilang penghasilannya enggak dibawa, karena memang kontrak-kontraknya sudah habis, dan PPD tidak bisa membeli bus listrik, sehingga waktu bergabung, kami bisa mengadakan 26 bus listrik ini. Jadi kami baru bisa 26, sehingga agak panjanglah napasnya *gitu loh*, Pak, buat, karena PPD *kan* 1500 orang yang harus digaji. Jadi, tapi kami berharap, mungkin di tahun ini kami bisa mengadakan lagi kira-kira, ya nanti gimana Transjakarta *sih* saya kira, tapi target kami *sih* 100.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pertanyaan saya, jadi nanti *businessman* ke depan itu, akan ada, dalam rencana Ibu lah *dulu* ya, entah itu dari sendiri atau PMN atau *gimana*, itu *kan* jadi bus listrik?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Betul.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nah, bus yang ada sekarang?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Kami mulai menggeser, jadi *kan* sekarang sebenarnya banyak lebih dari, dari 600 bus yang dibawa oleh PPD.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ke mana itu?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Ada yang di Kawasan Berikat.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Enggak, itu nanti statusnya di, Ibu jual atau?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Enggak, enggak, Pak.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tetap beroperasi di rute lain, *gitu?*

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Beroperasi jadi angkutan pegawai.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, oke.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Di beberapa kawasan industri seperti di Batang, lalu kemudian di Makassar, Mataram.

WAKIL KETUA (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, paham, paham.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Jadi memang kami geser, karena kalau angkutan, apa, angkutan jemputan pegawai itu standarnya tidak setinggi Transjakarta, *gitu*. Jadi, kalau di Transjakarta, umurnya itu maksimum 10 tahun. Jadi enggak boleh lebih dari 10 tahun, setelah 10 tahun, berarti enggak bisa dapat kontrak lagi, sehingga kami harus mengganti dengan bus listrik sesuai dengan Pergubnya, karena Pergub itu sudah tidak boleh lagi pengadaan baru dengan bus *combustion*.

Lalu kemudian, yang proyek di T3 tadi, Pak, memang itu setiap tahun kami harus ikut tender. Jadi walaupun itu jauh-jauh, tapi tetap tender. Ini yang sedang kami ajukan ke Kementerian Perhubungan, agar kami bisa mendapat penugasan seperti perusahaan *transport* lainnya. Jadi karena enggak setiap tahun, tender, tender, tender, jadi begitu kami mau *remajain*, *kan* kami harus minta ke bank karena busnya tidak diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, bank biasanya enggak menarik kalau tendernya setiap 1 tahun, kami minta supaya itu *multiyears*, *tapi* sampai hari ini belum bisa.

Di Bandung, Surabaya, kami sudah juga punya angkutan perkotaan bus listrik. Jadi memang kalau dilihat tumbuh, memang pertumbuhannya masih dari eks DAMRI *gitu*, karena memang *sales*-nya dari situ, dari, karena begitu Covid selesai, ya langsung berputar lagi rodanya, *gitu*. Tapi kalau yang PPD karena dia 95% kontrak dengan Transjakarta dan Transjakarta sudah mencanangkan harus berubah menjadi bus listrik, jadi pada kontrak-kontrak baru.

Nah, lalu, kemudian tadi ada pertanyaan, Pak, kalau boleh dijawab. Jadi, DAMRI sebetulnya *take home pay* itu tidak ada yang di bawah UMK, karena BPJS kesehatan itu kami bayarkan, ditanggung oleh pemerintah, tidak, *eh* ditanggung pemerintah, maaf, ditanggung perusahaan, tidak dipotongkan dari gajinya. Lalu kemudian, di luar dari pembayaran itu, BPJS Kesehatan maupun BPJS-TK, BPJS Tenaga Kerja, itu kami bayar dari, di luar dari THP-nya dia.

Lalu, juga demikian, dana pensiun yang sekarang dikelola DPL, DPLK Mandiri, itu pun tidak dipotongkan dari gaji mereka. Lalu dari gaji mereka memang ada komponen gaji, tetapi juga ada komponen komisi yang kita sebut dengan uang dinas jalan, di mana uang dinas jalan itu sekitar 7% dari total *sales*.

Jadi sebetulnya kalau *take home pay*, itu memang tidak ada yang di bawah UMK, dan itu kita masuk juga ke dalam uang makan. Ini yang sedang



kami perbaiki, Pak, ini karena sistem yang lama, jadi memang tidak ada potongan buat karyawan sama sekali untuk membayar BPJS-TK maupun BPJS, eh BPJS Kesehatan. Saat ini untuk BPJS Kesehatan, utang kami nol. BPJS-TK, tadi sebagaimana sudah kami sampaikan, memang kami ada utang akibat dari sisa-sisa Covid yang belum kami bayar, pada masa Covid memang kami minta penangguhan, Bu, bukan enggak bayar.

Jadi, lalu kemudian, dikasih *restruck* oleh BPJS-TK, jadi kami mengangsur setiap bulan itu sekitar Rp5 miliar. Jadi kalau kami punya uang lebih, kami angsur lebih banyak, tapi kalau kami, biasanya sekitar antara 4 sampai 5 miliar per bulan kami mengangsur untuk membayar utang-utang BPJS TK-nya, jadi demikian juga untuk DPLK.

Nah *tapi* kalau yang PPD, karena dia dikelola sendiri, jadi otomatis kami harus menganggarkan sendiri saat ini, berbeda dengan yang dikelola oleh Bank Mandiri, jadi, oleh Dana Pensiun Mandiri, maksud saya.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin, boleh Pak? Izin ya, Bu, ya, interaktif ya.

Tadi saya karena baru datang saya belum *tune in*, saya kira saya baca sedikit kronologisnya ini;

- bahwa pada tanggal 23 Desember 2002, ada Kepres Nomor 25/2002 tentang Penyusunan Peraturan Pemerintah, yang pada lampirannya poin 18 menyebutkan, "Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan Pengangkutan Jakarta Ke Dalam Perum DAMRI dengan pemrakarsa Menteri BUMN".
- 27 Desember 2023, Menteri BUMN, Erick Thohir memberikan keterangan mengenai mergernya Perum PPD dan DAMRI, menilai penyatuan menjadi langkah terbaik.
- 6 Juni 2023, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggabungan tersebut dan kemudian ada PP ya, yang mengata, dengan ada surat edaran Perum DAMRI Nomor 0009.00/HK/104/PM/00/DU/2023 yang berisikan seluruh aktivitas operasional Perum PPD, aktiva, pasiva, hak kewajiban, termasuk hubungan kerja ke karyawan selanjutnya menjadi tanggung jawab Perum DAMRI.

19 Juni 2023, Dirut Perum DAMRI, Setia N. Milatia Moemin, dalam acara perayaan penggabungan, menjelaskan tidak ada PHK, semua karyawan termasuk dari PPD terserap semua ke DAMRI, kami pegang komitmennya, ya, Bu, ya.

Kemudian Direktur Keuangan Perum DAMRI, Prasetyono memberikan gambaran target laba meningkat 750 miliar sampai



2027 berdasarkan kajian buku putih yang disusun dengan konsultan pendamping, *Project Manager Officer*, PMO, sehingga target pendapatan atau *revenue* perusahaan pada 2027 mencapai 2,3 triliun. Nah, apakah ada pergeseran, nanti mungkin bisa dijelaskan, saya jawaban tertulis tidak apa-apa.

- Kemudian 23 Agustus 2023, ini ada persoalan ketenagakerjaan, bahwa ada beberapa persoalan, misalnya karyawan eks Perum PPD digaji di bawah upah minimum.

Tadi ibu mengatakan tidak ada yang di bawah upah minimum ketika itu *take home pay*, ya, Bu, ya? Tetapi Ibu, mungkin, marilah kita berdiskusi lagi, bagaimana sistem pengupahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mungkin niat Ibu baik, atau kurang adanya pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem ketenagakerjaan, meskipun mereka *driver*, hubungannya adalah mereka pekerja. Dan Perum DAMRI, bukan Ibu, Perum DAMRI adalah pemberi kerja, begitu. Ada sistem pengupahan, di mana upah minimum itu apakah bisa digabungkan dengan tadi ada bonus segala macam.

Lalu bagaimana sistem jaminan sosial, ada *cost sharing* antara pekerja dan pemberi kerja, tidak ditanggung semua oleh pemberi kerja yang ketenagakerjaan, Bu, sehingga ini tidak bisa diberi, dijadikan alasan bahwa, kalau secara total yang dibawa pulang itu sudah sesuai upah minimum, enggak bisa seperti itu, Bu.

Kita saling menjaga, karena DAMRI juga adalah mitra komisi, tentu kami sangat senang jika diberikan kesempatan untuk berdiskusi khusus, misalnya pesangon karyawan yang sudah lebih dari 1 tahun diberhentikan, tidak dibayar, lalu kemudian, tadi ada masalah BPJS, Ibu.

Ini jadi penting *loh*, Bu. Enggak bisa alasannya karena ada masalah lalu dicicil, enggak bisa, Bu, saya ingatkan, Bu, undang-undang yang mengatakan *loh*, bisa pidana *loh* Bu. *Kan* enggak lucu juga kalau kita mau meningkatkan kinerja DAMRI, tapi kemudian ada indikasi pidana hanya karena persoalan BPJS yang sebenarnya ketika dicermati, itu bisa diselesaikan. Saya yakin Ibu bisa.

Terima kasih, Pimpinan.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Makasih, Bu.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih Teh Rieke, ternyata di belakang tambahannya lebih banyak.



DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Baik.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan lanjutkan, Bu.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Terima kasih, Bu Rieke Diah Pitaloka.

Nanti kami akan, mungkin kami akan minta *assistance* juga kepada Ibu, kapan-kapan, Bu, kalau Ibu sempat pas lagi ini, karena memang kami sedang memperbaiki semua struktur penggajian ini. Jadi sekarang ini, semua memang kami sedang lakukan secara paralel. Hanya, tadi, ada beberapa keterbatasan yang memang karena dari 4.800 orang, sekarang meningkat menjadi 6.005, 5.600 ya? 5.600-an orang, total, di mana yang sisanya itu memang kami harus betul-betul teliti dalam menghitung struktur penggajian ini, tapi kami memang sedang dalam proses memperbaiki, Bu, nanti kami akan minta masukan. Jadi kami juga terus-menerus konsultasi ke Disnaker untuk masalah ini, jadi supaya kami bisa menyelesaikannya sesuai dengan aturan.

Lalu tadi, memang mengenai ini juga, PKWT-PKWT yang lama, jadi ini dari dua perusahaan memang terjadi, saya harus akui, ini juga yang sedang kami usahakan untuk menyelesaikan.

Lalu untuk tadi Ibu, eh Pak Harris menyebutkan, jadi memang orang yang disebut tadi, itu sebetulnya bukan sekretaris saya, Pak, dia asisten saya, dia, karena saya pakai sekretaris adalah *corporate secretary*, jadi dia yang menyiapkan seluruh *analisa* pekerjaan, lalu kemudian, dan dia sudah ikut menjadi asisten saya selama 6 tahun, usianya saat ini 35 tahun, jadi bukan muda ya, Pak, ya.

Dan sebelum bekerja di DAMRI, dia itu 3 tahun bekerja di Hotel Borobudur dan 2 tahun bekerja di Sheraton Hotel. Jadi dia punya jam, punya jam terbang yang panjang untuk *hospitality* dan *service management*. Nah, kebetulan kami saat ini, walaupun sudah di, dari dulu ada, slot Kasubdiv Pelayanan, Pelayanan Penumpang, di mana memang ilmu *service management* di DAMRI itu ilmu baru. Jadi kebetulan, ada orang yang sudah punya 12 tahun jam terbang, hanya kebetulan wajahnya muda ya, karena biasa orang hotel cantik-cantik, Pak, jadi kalau orang-orang yang di perhotelan *kan rapi-rapi*, enggak ada, Pak.

Jadi sebetulnya, sebelum dia, kebetulan saya juga dulu Divisi Pelayanan pernah di bawah langsung dirut, jadi memang dia sebetulnya



sudah melakukan pekerjaan itu sejak lama, tapi karena saya masih membutuhkan dia sebagai asisten dan analisis, jadi saya masih menggunakan dia sebagai asisten. Jadi dia, dan dia S1 *Hospitality*, Pak, jadi *management hospitality*. Jadi memang saat ini sangat sulit untuk cari di DAMRI *management hospitality*, jadi itu mungkin penjelasannya, kenapa ada *issue* bahwa sekretaris saya tiba-tiba jadi kasubdiv, sebetulnya dia sudah 12 tahun, bukan baru.

Lalu kemudian, pada saat dilakukan penggabungan sebagaimana sudah dibacakan oleh Bu Diah tadi, Bu Rieke, itu memang kami melakukan *due diligence* dengan didampingi konsultan, itu bersama-sama dengan PMO, kebetulan Pak Husninya sudah pergi. Lalu, nanti kami akan bikin tertulis segala kronologisnya, Pak, jadi, maupun buku putihnya, semua dokumennya akan kami *submit* kepada Bapak.

Lalu kemudian, tadi saya sudah mengatakan bahwa terjadi *cross subsidy* di dalam DAMRI sendiri, karena DAMRI punya kewajiban-kewajiban sosial, seperti di daerah-daerah perintis tadi, tetapi memang sampai dengan hari ini, 90% komposisi, itu dari pendapatan didapat dari sektor *komersil*, jadi dari *komersil*-nya.

Strateginya tentu saja kami akan menaikkan seluruh volume dan skala bisnis yang ada. Dan saat ini bukan hanya kita membenahi armada, Pak, *tapi* secara sistem, saat ini kami sudah terintegrasi dengan KAI Access, sistem penjualan kami. Lalu kemudian kemarin baru, sebulan yang lalu selesai dengan Citilink. Lalu kemudian, saat ini sedang berproses dengan Whoosh, lalu dengan Angkasa Pura 2, Angkasa Pura 1, itu sudah berjalan, lalu kemudian dengan ASDP sudah berjalan. Jadi ada integrasi *ticketing* di sini, jadi bukan hanya masalah, masalah armadanya sendiri. Jadi kami juga mulai *merubah* cara penjualan kami dan lain-lain.

Lalu untuk pembenahan manajemen jadi, memang, kami tahu harus ada tindakan ekstrem, Pak, jadi memang kami sudah melakukan beberapa tindakan, untuk paling tidak, *men-downsize*, lalu kemudian membuat lebih efisien dari seluruh proses bisnis yang ada. Saat ini kami sudah selesai membuat *master plan* jaringan, lalu kemudian perubahan struktur organisasi juga sudah kami mulai finalkan, sehingga bisa *keep-up* dengan perubahan.

Mengenai belum diperpanjangnya Transjakarta, ada benarnya pada saat penggabungan, Pak, memang PPD kesulitan *bankable*-nya, *bankability*-nya sangat rendah, tetapi mulai bergabung sehingga menggunakan, kita sempat goyang juga, karena tadi, apa namanya, *bankability* itu mempengaruhi terhadap kredibilitas kita di bank, tapi sekarang sudah mulai membaik lagi, dengan sudah beroperasinya seluruh direktorat komersial.

Kami terus menaikkan segmen-segmen *komersil* kami, demikian juga dengan Transjakarta. Kami berharap, makanya kami minta PMN untuk pengadaan *bis* listrik Pak, supaya 497 bus itu cepat dikon, di, di, diganti dengan *bis* listrik, supaya kondisi keuangan DAMRI akan cepat membaik,



karena Transjakarta termasuk *secure income* dan mereka biasanya bayarnya juga enggak telat, *gitu*.

Jadi, pertanyaan Pak Husein tadi, asal investasi untuk TJ, itu dari putaran bisnis sendiri, tidak beda dengan yang lainnya, operator lain yang ada di Transjakarta, Pak, jadi bukan dari pemerintah. Baru kali ini kami mengajukan dari PMN untuk yang 100, tapi totalnya 497, kami pemegang kuota terbesar kedua setelah Bapak, jadi, siapa yang enggak tahu Pak Husein, Pak.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, pengusaha bus.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Paling besar kuotanya, saya tidak teruskan, saya tidak teruskan lagi. Jadi, jadi memang.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Maksud kita bisa saling belajar, *gitu*.

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Lalu perbaikan manajemen, kami terus memperbaiki secara manajemen ini, Pak. Nah, karena memang pada proses transformasi dan *restructuring* seperti ini pasti terjadi gesekan-gesekan, tetapi kami mencoba untuk men-*smoothing* sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Tentu saja rute-rute yang kami memberi kontribusi terbesar, ini mulai kami lebih, lebih *emphasis*, lebih kencangkan *gitu*, lebih, lebih keras, lebih kami fokuskan, sehingga nanti terfokus. Dan ada beberapa segmen yang memang luar biasa buat DAMRI, yang menjadi *backbone*, adalah yang pertama, tadi, angkutan lintas batas negara itu *backbone*, Pontianak, Cabang Pontianak, Cabang Lampung, lalu kemudian Cabang Soekarno Hatta atau Basoetta, itu juga termasuk *backbone*.

Jadi memang ini kami konsentrasi, beberapa waktu Covid kami sempat menutup berapa titik, ini yang kami mulai hidupkan lagi. Jadi, mudah-mudahan ini juga *part* dari bagian untuk memperbaiki kondisi keuangannya DAMRI. Untuk peremajaan bus, untuk keperemajaan bus, dengan keluarnya Peraturan Menteri, kami 3 tahun berjuang untuk Peraturan Menteri ini, bahwa tidak harus memiliki lagi, tapi boleh hanya menguasai atau *operation lease*, ini *Insyah Allah* akan mengurangi beban kami terhadap investasi dan depresiasi kepada buku keuangan perusahaan.



Jadi sebelumnya memang, Pak, untuk pengadaan bus itu harus beli, jadi harus memiliki, tetapi kami berjuang 3 tahun dan pada tahun 2023 awal, itu keluar Peraturan Menteri bahwa kami boleh melakukan *operation lease*. Jadi, beberapa untuk peremajaan bus, kami lakukan dengan *operation lease*, jadi ini kami menggeser dari CAPEX menjadi OPEX.

Jadi, bukan hanya dari sisi operasi kami melakukan *restructuring*, tapi juga dari sisi struktur keuangan, jadi yang dari CAPEX kami geser ke OPEX, karena setiap tahun DAMRI sebelum penggabungan, itu harus menanggung depresiasi sebesar 300 sampai Rp400 miliar, di mana kalau sudah boleh *operation lease* digeser ke OPEX, mudah-mudahan kesehatan keuangan kami lebih baik.

Nah, demikian juga, tadi memang, begitu masuk ke DAMRI, DAMRI itu punya 46 cabang di seluruh Indonesia. Jadi waktu PPD masuk ke DAMRI, otomatis orang-orang tersebut pasti kami sebar, karena konsekuensi dari waktu kita tanda tangan kontrak masuk ke DAMRI adalah kita tidak boleh menolak apabila dipindahkan ke mana saja, karena kalau ada orang menolak, semua orang nolak untuk ditaruh di daerah T3, Bu. Oleh sebab itu kami memberi kontrak bersedia tidak bisa menolak, atau kalau dia menolak berarti dia *downgrade* ya, kalau enggak salah *gitu* kontraknya.

Nah, karena nanti kasihan di T3 ini enggak ada orang, di daerah Indonesia Timur enggak ada orang, karena medannya cukup berat, *gitu*. Jadi, kami harus membagi seluruh pegawai, jadi apa, perpindahan pegawai ini, otomatis tidak hanya terjadi pada yang eks DAMRI, tapi juga eks PPD karena kita harus *equal treatment gitu*. Jadi, mau enggak mau konsekuensi ada di DAMRI adalah dia harus ada di seluruh Indonesia.

Lalu kemudian, *Insyah* Allah untuk Pak Martin, kami coba selesaikan persoalan-persoalannya sebisa mungkin, mudah-mudahan *sih* di beberapa bulan ke depan, dengan penghasilan dan *revenue* dari, dan dari *revenue* nontiket pun, *Insyah* Allah ada beberapa, beberapa angka yang bisa kami selesaikan, *tapi* kami akan usaha keras, Bu. Jadi memang, skala bisnis sekarang kami genjot terus, jadi kami juga sudah menyediakan seperti Malang-Jakarta dengan *double decker* dan lain-lain, jadi, mau enggak mau harus dapat dari operasional.

Pada tren penggabungan, Pak, kepada Pak Sarmuji, memang pada ta, ini *kan* baru tahun pertama ya, Pak, karena kami ditargetkan untuk menyelesaikan seluruh proses penggabungan pada 2027, yaitu dengan laba yang tadi di, yang tadi sudah di, di *value creation*, mohon maaf, *value creation* 2,7 triliun ya? 2,7 triliun di 2027.

Jadi, saat ini kami sudah berhasil mendekati angka, mudah-mudahan kalau semua berjalan lancar di tahun ini, mudah-mudahan kami bisa mencapai hampir 2 triliun, jadi 1,8-an *sih nyampe*, 1,7 1,8 mudah-mudahan dalam prediksi, mudah-mudahan semuanya lancar bisa tercapai. Tapi



memang tadi, tetap ada beberapa hal yang memang kami harus dalam, dalam, dalam mencicil atau melakukan tahapan utang-utang yang bermasalah ini, itu kami harus tetap lakukan. Jadi, terutama yang kredit-kredit, apa, utang-utang macet itu, eks PPD, Bu, Rp254 miliar. Jadi, ini memang, beberapa kami sudah menutup sekitar, 48 apa 24 ya? 28 miliar, itu sudah kami selesaikan dari 254. *Insyah* Allah kami mencicil terus, jadi *Insyah* Allah kami akan cicil terus sampai dengan selesai.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Cukup, Bu, ya?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Iya, itu *aja*, Pak.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, baik, itu tadi jawaban dari Bu Dirut, dan dengan jawaban Bu Dirut kita bisa mengambil kesimpulan atas rapat dengar pendapat kita kali ini. Tadi banyak sekali yang mewanti-wanti agar penyelesaian tindakan *fraud* itu segera dilakukan pasca penggabungan.

Saya bacakan,

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan penggabungan Perum PPD dengan Perum DAMRI, ini Perum DAMRI-nya *dulu* mestinya ini, dan meminta penyelesaian tindakan *fraud* atau pelanggaran yang ditemukan pada saat penggabungan dan akan membawa persoalan ini dalam rapat dengan Menteri BUMN.

Oke, Pak Harris? Pak Husein? Untuk urusan *bis* ini saya tanya Pak Husein ini.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI mendorong Perum DAMRI untuk terus meningkatkan kinerja keuangan maupun operasional pasca penggabungan dengan melakukan *roadmap* bisnis yang jelas, sehingga pengembangan bisnis yang inovatif, *kok* sehingga pengembangan bisnis ya, coba direvisi kata-katanya, tapi intinya itulah, pengembangan bisnis yang inovatif dilakukan melalui sinergi BUMN, diperbaiki kalimatnya.



F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Pak, izin, Pak, boleh, Pak?

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

“Komisi VI DPR RI meminta *roadmap*, *roadmap* bisnis Perum DAMRI”, tadi Ibu target sampai 2027, *roadmap*-nya itu seperti apa, di dalam *roadmap* itu, kami, itu *dulu deh* satu ya, cukup ya, mohon diberikan *roadmap*-nya, Bu.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalimatnya diperbaiki.

F-PDIP (Ir. HARRIS TURINO, M.Si., M.M.):

Dengan menyusun *roadmap* bisnis yang jelas.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Koma, pengembangan, dan pengembangan bisnis yang inovatif, tadi ada yang mendorong ini, Pak, sinergi BUMN, ya.

Pokoknya diperbaikilah, nanti kita, ini sama-sama ya, oke, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI meminta Perum DAMRI untuk segera menyelesaikan pembayaran gaji karyawan dan kewajiban lainnya serta pembayaran kepada pihak ketiga yang tertunda cukup lama.

Bu Rieke?

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin, Pak, ini tidak apa-apa, tapi saya nanti minta *roadmap* tadi, Bu, ya.

Yang kedua adalah data karyawan migrasi PPD ke DAMRI, itu menjadi penting, dengan status karyawannya apa ketika di PPD, dan bagaimana ketika di DAMRI. Lalu skema upah di PPD seperti apa, dan bagaimana skema upah di DAMRI, dan jaminan sosialnya. Kemudian hak-hak karyawan yang



telah di PHK, termasuk dalam poin ini, ada berapa yang di PHK. Lalu kemudian tentang gaji yang ditangguhkan pada masa Covid, 30%, Bu, info yang kami terima, apakah gaji itu sudah dipulihkan atau belum ya, segera dijelaskan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nanti, nanti jawaban tertulis, Bu, ya. Jawaban tertulis dicantumkan, ya.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Baik, Pak.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ini *oke* ya, Teh Rieke ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI meminta Perum DAMRI untuk memperhatikan status karyawan dan pola karier yang jelas, sehingga dapat meningkatkan motivasi karyawan.

Oke? Pak Husein oke? Nah, ini harus saya tanya, urusan bis pokoknya.

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu pada Perum DAMRI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI. Termasuk semua data tadi yang diminta *Teh Rieke*.

Oke, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, draf kesimpulan sudah kita bacakan, silakan, Bu, kalau ada *closing statement*, ada?

DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN, M.B.A.):

Kami mengucapkan terima kasih, Pak, atas arahan dan kesempatannya, kami mohon dukungannya terus supaya *recovery process* dari DAMRI ini bisa berjalan baik, terima kasih.



Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullah,

Baik, dengan demikian selesai sudah

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Sebentar, Pak, terakhir, Pak, *closing statement* boleh *dikit aja*, sedikit *aja*, Pak.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau *closing statement*-nya, Teh Rieke di sini.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Eenggak, saya mau *ngasih support aja*.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, silakan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Komisi VI saya kira juga ingin DAMRI ini dalam kondisi perusahaan yang sehat, Bu, dan kami memahami ini proses merger dalam 1 tahun, *never give up* untuk DAMRI. Tapi jangan lupa DAMRI itu *kan* bukan hanya perbaikan mobilnya, Pak, ya, mobil enggak ada *supir* juga susah. Jadi, karyawan khususnya *driver* itu juga menjadi *core* dari bisnis DAMRI. Selamat berjuang, Ibu. Pimpinan, terima kasih, karena saya yang mendesak jadwal untuk DAMRI, mudah-mudahan ada perbaikan untuk DAMRI.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, terima kasih Teh Rieke. *Statement* Teh Rieke menjadi penutup acara ini. Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbilalamin*, rapat kita tutup.



Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

**DIREKTUR UTAMA PERUM DAMRI (DR. IR. SETIA N. MILATIA MOEMIN,
M.B.A.):**

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.40 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

